

Pendekatan Teori Sosiologi Sejarah (*Historical Sociology*) Dalam Penelitian Studi Hubungan Internasional

Rizal A.Hidayat

Universitas Al Azhar

rizal.aditya@uai.ac.id

Abstrak:

Tulisan ini mencoba mengeksplorasi penggunaan pendekatan salah satu teori alternatif dalam Hubungan Internasional, yaitu Sosiologi Sejarah (*Historical Sociology*). Sebagai sebuah pendekatan teori, *sosiologi sejarah* saat ini masih belum begitu banyak digunakan dalam ragam analisis fenomena politik internasional kontemporer. Dan tentunya terkait dengan berbagai isu strategis yang menjadi mainstream penelitian studi hubungan internasional dewasa ini. Hal ini disebabkan oleh dua argumentasi mendasar yang diajukan dalam tulisan ini, yaitu sosiologi sejarah masih menduduki "*The Second Class Theory*", dan para *proponent* pendekatan teori ini memiliki latar belakang keilmuan yang bertolak belakang dari studi hubungan internasional, namun memiliki kontribusi kuat dalam memberikan nuansa alternatif mengenai perilaku aktor, tatanan internasional, unit analisis maupun level analisis.

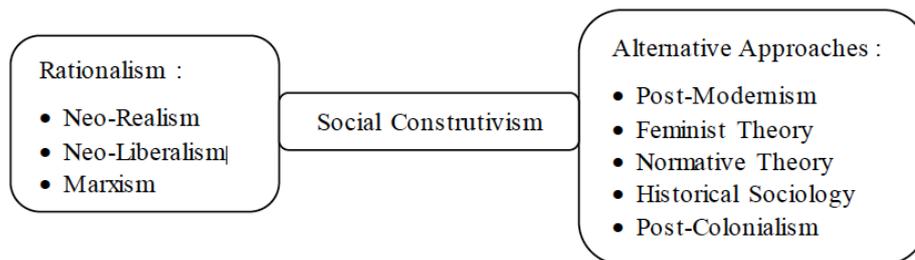
Kata Kunci:

sosiologi sejarah, naratif, studi kasus, moralitas, budaya dan emosi

Pendahuluan

Penggunaan pendekatan teori alternatif dalam Hubungan Internasional berkembang sebagai reaksi umpan balik terhadap hegemoni pendekatan teori rasionalisme sepanjang konflik ideologis dalam perang dingin, dan berakhir sejalan dengan perkembangan globalisasi yang merubah pergeseran isu strategis, unit analisis dan level analisis dalam studi hubungan internasional. Dari pergeseran isu strategis, unit analisis dan level analisis dalam setiap penelitian hubungan internasional, maka perkembangan teori-teori hubungan internasional tidak hanya menjadikan relasi antar aktor yang terlibat lebih dari sekedar relasi bilateral, namun menjadikan teori-teori alternatif dalam hubungan

internasional lebih kompleks dan bervariasi dalam menganalisis setiap fenomena politik internasional, di samping menjadikan teori-teori hubungan internasional tersebut sebagai teori politik internasional dalam sebuah sistem dunia/internasional yang anarkis dikarenakan satu sama lain berusaha saling mendominasi untuk tujuan dan kepentingan tertentu (kekuasaan) dalam ranah politik internasional itu sendiri. Output perkembangan globalisasi teoritis dalam studi hubungan internasional di atas dapat digambarkan dalam skema perkembangan sebagai berikut (Baylis and Smith, 2000: 275):



Dengan demikian *positioning* teori-teori alternatif di atas sebagaimana yang dijelaskan oleh Baylis dan Smith berusaha menempatkan dua kategori perdebatan teoritis dengan satu teori sebagai jembatan gap dalam meminimalisir kedua pendekatan teori yang dipakai. Dalam skema di atas, teori-teori alternatif yang dimaksud terdiri dari Teori Post-Modernisme, Feminisme, Normatif, Sosiologi historis, post-kolonialisme.

Pendekatan teori *historical sociology* dalam teori alternatif pada umumnya dalam hubungan internasional merupakan jawaban atas kritik terhadap teori-teori hubungan internasional yang terlebih dahulu *establish* sebagai dampak kemunculan perang-perang dunia yang terjadi sampai dengan selesainya konflik ideologi pada era perang dingin, dimana menempatkan *state centris/ government system* sebagai unit analisa utama dalam setiap kajian hubungan internasional.

Secara kronologis, perkembangan pendekatan teori *historical sociology* memasuki abad ke-21 melengkapi pendekatan teori alternatif yang berangkat dari dua *mainstream* alur utama dalam studi hubungan internasional:

- 1) Alur utama *pertama* studi HI terdiri atas tiga sub alur dimana yang pertama, hubungan internasional dipelajari melalui penelaahan kejadian-kejadian yang sedang jadi berita utama dan dari bahan itu dicoba dibuat semacam pola umum kejadian. Asumsinya adalah bahwa kesalahpahaman dan konflik antar bangsa bisa dihindari kalau peristiwa-peristiwa penting diikuti dan ditelaah secara seksama. Kedua, hubungan internasional waktu itu dipelajari melalui studi tentang organisasi internasional. Ini didasarkan pada

asumsi bahwa konflik bisa dikelola dan diselesaikan kalau dapat diciptakan suatu aturan main atau tertib hukum yang didukung oleh perangkat organisasi seperti Liga Bangsa-Bangsa. Orientasi pendekatan ini adalah reformis. Ketiga, Studi hubungan internasional pada masa itu adalah model analisa yang menekankan ekonomi internasional. Dengan berdasar pemikiran Marxis-Leninis, aliran analisa ini menggunakan variabel-variabel ekonomi untuk menjelaskan terjadinya konflik dan perang internasional di masa sebelumnya. Di Amerika Serikat berkembang analisis yang menyebutkan bahwa yang mendorong negeri itu terlibat dalam perang dunia I adalah kepentingan kaum usahawan, industrialis dan penanam modal besar (Mas'oed, 1994:15). Secara ontologis, alur pertama menunjukkan bahwa pada awalnya hubungan internasional berfokus pada segala hal yang menjadi pokok inti permasalahan yang terjadi dalam Perang Dunia I. Konstruksi pengetahuan yang dibangun masih berkuat pada studi hubungan ineternasional yang bermuara pada konflik antar negara-bangsa, atau studi konflik yang menjelaskan persoalan perang dan damai dalam sistem internasional. Hubungan konfliktual antar negara, organisasi internasional yang diperlukan untuk mengatur hubungan antar negara dan faktor peran aktor ekonomi politik domestik yang melibatkan negaranya ke dalam perang dengan negara lain masih mendominasi obyek pengetahuan yang dikonstruksi dalam studi hubungan internasional dalam ini berupa politik antar negara-bangsa dalam konteks hubungan konfliktual terbuka (perang).

- 2) *Alur utama kedua* dalam studi hubungan internasional secara ontologis merefleksikan perubahan studi hubungan internasional setelah perang dunia kedua yang melahirkan paradigma realis yang lebih positifis dalam mengkontruksi perilaku negara dalam arena kekuasaan internasional. Paradigma realis, yang mendominasi teorisasi hubungan internasional selama kurang lebih dua dasawarsa sesudah perang dunia II, merupakan wujud dari upaya mengembangkan pendekatan teoritis yang sekaligus bisa mendeskripsikan dan menjelaskan perilaku negara dalam hubungan internasional dan bisa memberikan kerangka preskriptif bagi para negarawan dalam membuat keputusan. Dengan demikian, dua alur utama dalam obyek studi hubungan internasional diatas masih berada pada aktor negara. Perilaku negara sangat erat kaitannya dengan perjuangannya dalam rangka memperoleh dan mempertahankan kekuasaan dalam arena hubungan antar negara-bangsa pada tatanan struktur politik internasional.
- 3) *Alur utama ketiga* menunjukkan perubahan obyek studi yang tidak hanya berlaku pada aktor negara dalam arena internasional, namun juga terjadi

pada aktor non negara dan masyarakat internasional. Globalisasi melahirkan aneka konstelasi politik global yang dominasinya tidak hanya dipengaruhi oleh aktor negara, namun juga dipengaruhi oleh eksistensi aktor non negara dalam arena politik internasional. Globalisasi tidak hanya bicara persoalan perang dan damai secara utuh, namun juga mengenai studi kesinambungan dan perubahan aspek-aspek lain di luar kuasa politik formal global. *Kedua*, studi politik global kontemporer menunjukkan berkurangnya arti penting kontrol wilayah. *Ketiga*, studi politik global hari ini mengungkapkan betapa rapuhnya perbatasan negara-bangsa dan betapa mudahnya orang, ide dan barang dapat berpindah melintasi negara-bangsa (Mansbach dan Rafferty, 2012:VII).

Bagaimana mendeskripsikan pendekatan teori sosiologi historis dalam konteks penelitian ilmiah dalam studi Hubungan Internasional? Untuk dapat menjawab pertanyaan ini, maka tentunya harus dipahami dulu mengenai *apakah sosiologi historis itu sendiri?*, kemudian *keterkaitan pendekatan teori sosiologi historis itu sendiri terhadap elemen-elemen kunci karakteristik penelitian ilmiah, berikut ragam isu strategis yang relevan diterapkan pada strategi penelitian tersebut?* Yang pertama mengenai pengertian pendekatan sosiologi historis itu sendiri. Pendekatan teori sosiologi historis tidak dapat dipahami sedemikian rupa, jika kita tidak mengawalinya dari pengertian hakiki sosiologi historis yang berangkat dari contoh-contoh teori yang masuk dalam pendekatan teori ini. *Kedua*, terkait dengan aplikasinya dalam penelitian ilmiah yang inheren dengan pertimbangan filsafat ilmu (pertimbangan ontologis, epistemologis dan aksiologis).

Pembahasan

Pendekatan Teori *Historical Sociology*

Pertanyaan pertama terkait dengan beberapa beberapa ide/gagasan maupun asumsi dasar. *Kedua*, para teoritis dan hasil karya mereka. Dan *ketiga*, isu-isu konseptual yang meliputinya.

Mengenai ragam ide/gagasan dan berbagai asumsi mendasar dari pendekatan teori *Historical Sociology* yang dibangun adalah :

- 1) struktur sosial adalah hasil dari serangkaian proses sosial yang kompleks (di dalam suatu negara-bangsa)
- 2) Negara-bangsa dihasilkan dari berbagai interaksi kekuatan-kekuatan sosial yang bekerja di dalam negara (domestic) dan masyarakat internasional
- 3) Modernisasi dihasilkan dari terjadinya fenomena industrialisasi, demokratisasi, urbanisasi dan individualisasi

Kedua, mengenai teoritisi berdasarkan sudut pandang ketiga ide atau asumsi dasar di atas, maka salah satu teoritisi yang mempengaruhi perkembangan sosiologi sejarah dalam hubungan internasional melalui karya monumentalnya adalah Michael Mann (1988) dengan *IEMP Model Of Power Organization* (IEMP: Ideologi, ekonomi, militer dan politik). Di luar Mann sebenarnya paling tidak terdapat dua *proponent* kontributor dari perkembangan *Historical Sociology*. Keduanya adalah James Tilly (*Nation-State*) dan Emmanuel Wallerstein (*World System*).

Penulis mengambil pemikiran Mann sebagai salah satu contoh teoritisi *Historical Sociology* di atas didasarkan pada penilaian dasar penulis sendiri, bahwa pada dasarnya perilaku domestik negara dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan sosial yang mendominasinya. Masing-masing kekuatan sosial memiliki struktur sosial tersendiri yang terbentuk melalui serangkaian proses sosial yang menjadikan terwujudnya negara-bangsa yang bersangkutan. Masing-masing kekuatan dengan demikian akan bekerja di dalam negara tersebut dan dalam masyarakat internasional sehingga modernisasi pada negara-bangsa yang bersangkutan tidak hanya dipengaruhi faktor domestik akan tetapi juga faktor internasional melalui relasinya dengan kekuatan-kekuatan sosial internasional.

Kekuatan-kekuatan sosial yang dimaksud merupakan refleksi kepemilikan *power* yang dari Inti pemikiran Mann diorganisasikan melalui elemen-elemen kekuasaan berupa ideologi, ekonomi, militer dan politik. Sehingga menurut Mann (Baylis and Smith, 2005:277): "*The struggle to control IEMP power organizations provides the central drama of social development. Societies are structured primarily by entwined IEMP power*".¹ Jadi Mann menegaskan bahwa perkembangan sosial di dalam suatu negara-bangsa merupakan pusat aktivitas perjuangan negara dalam rangka mengontrol pengorganisasian kekuasaan ideologi, ekonomi, militer dan politik. Kontrol terhadap kekuasaan ideologi, ekonomi, militer dan politik didasarkan pada tiga aspek landasan kekuasaan (*three aspects of power*):

- *Distributive power and collective power*
- *Power may be extensive or intensive*
- *Power may be authoritative or diffused*

Distribusi *power* maupun *collective power*, atau kemampuan *power* untuk

¹ Mann mengembangkan pemikirannya mengenai Model IEMP Power ini dalam tulisannya dengan judul : *The Sources of Social Power, Vol.2 : The Rise of Classes and Nations-States, 1760-1914, Cambridge, Cambridge University Press. 1993*. Pemikiran awal IEMP Power oleh Mann ditulis dalam Vol.1 pada tahun 1988 dengan judul : *The Sources of Social Power, Vol.1 : A History of Power From The Beginning To 1760 AD, Cambridge, Cambridge University Press. 1988. 5*

diimplementasikan secara ekstensif maupun justru intensif, apakah secara otoritatif atau justru sebaliknya bagi Mann merupakan pengejawantahan sumber-sumber kekuasaan yang memobilisasi perkembangan sosial suatu negara-bangsa digerakkan oleh sumber-sumber kekuasaan berupa ideologi, ekonomi, militer dan politik. Dengan demikian keempat sumber kekuasaan di atas dalam memobilisasi perkembangan sosial negara-bangsa oleh Mann dideskripsikan sebagai berikut:

- 1) *Ideological power derives from the human need to find ultimate meaning in life, to share norms and values, and to participate in aesthetic and ritual practices. Control over ideology bring general social power.*
- 2) *Economic power derives from the need to extract, transform, distribute and consume the resources of nature. It is peculiarly powerful because it combines intensive cooperation with extensive circuits of distribution, exchange and consumption. This provide a stable blend of intensive and extensive power and normally of authoritative and diffused power.*
- 3) *Military power is the social organization of physical force. It derives from the necessity of organized defence and the utility of aggression. Military power has both intensive and extensive aspects, and it can also organize people over large areas. Those who monopolize it can wield a degree of general social power.*
- 4) *Political power derives from the usefulness of territorial and centralized regulation. Political power means state power. It is essentially authoritative, commanded and willed from a centre.*

Dengan demikian pemikiran Mann sebenarnya menekankan pada perkembangan sosial masyarakat suatu negara-bangsa yang terbentuk dari hasil perjuangan atas kontrol ideologi, ekonomi, militer dan politik. Terbentuknya masyarakat dari negara-bangsa yang bersangkutan, terstruktur secara terikat dari interaksi kekuasaan antar kelas sosial yang terwujud dari basis ideologi, ekonomi, militer dan politik.

Kemudian karakteristik *ketiga* berisi kandungan isu-isu strategis yang ditekankan pada kajian pendekatan teori sosiologi historis. Beberapa isu strategis yang diangkat dalam pendekatan teori sosiologi historis merefleksikan empat faktor utama ketika pendekatan teori digunakan dalam penelitian hubungan internasional. Linklater dalam *Theories of International Relations: Historical Sociology* (2009: h.140-148), membagi Keempat faktor utama kajian analisis isu strategis dalam pendekatan teori sosiologi historis adalah sebagai berikut :

- 1) *Power and production : development of material power and systems of production. The spread of industrial capitalism and the expansion of state power which includes its capacity to wage ever more destructive forms of warfare explain that development.*
- 2) *Power and Interdependence*
- 3) *System and society*
- 4) *Morality, culture and the emotions : the idea of structure suggest the brute realities of economic power and coercive capabilities that form major external constraints on human action*

Dengan demikian faktor *power* dan produksi; *power* dan interdependensi; sistem dan masyarakat; moralitas, budaya dan emosi seperti yang dimaksud oleh Mann dapat digerakkan oleh basis-basis kekuasaan yang bersumber dari ideologi, ekonomi, militer dan politik. Sejauh mana aspek-aspek *power* mampu memobilisasi salah satu dari keempat jenis isu strategis dalam pendekatan *historical sociology* yang ada tersebut di atas, tergantung dari seberapa besar *power* yang ada digunakan oleh kelompok-kelompok sosial yang mendominasi struktur sosial suatu negara-bangsa. Basis-basis kekuasaan masing-masing hidup dalam struktur sosial yang di dalamnya penuh dengan interaksi berbagai macam kelompok sosial dominan, yang dalam sistem politik domestik menjadi perilaku suatu negara-bangsa yang homogen atau heterogen terhadap hubungannya dalam politik internasional dan antar kawasan. Dalam hal ini, model IEMP Mann berguna memperdalam pemahaman kita mengenai negara itu sendiri, suatu langkah pertama dalam mengevaluasi suatu tingkat di mana kekuatan negara berubah di bawah pengaruh kekuatan globalisasi segala hal pada akhir abad 20 (Griffiths, 1999:242-243).

Pendekatan Teori *Historical Sociology* Dalam Penelitian Hubungan Internasional

Terkait dengan aplikasinya dalam penelitian ilmiah yang inheren dengan pertimbangan filsafat ilmu (pertimbangan ontologis, epistemologis dan aksiologis). Pendekatan teori sosiologi historis akan relevan jika digunakan ke dalam beberapa karakteristik penelitian kualitatif sebagai berikut²:

<i>Characteristic</i>	<i>Narrative Research</i>	<i>Grounded Theory</i>	<i>Case Study</i>
Focus	<i>Exploring the life of an individual</i>	<i>Developing a theory grounded in data from</i>	<i>Developing an in-depth description and</i>

² Di samping karakteristik penelitian *narrative*, *grounded research* dan *case study*, maka secara keseluruhan identifikasi Creswell ditambah dengan karakteristik penelitian fenomenologi dan Etnografi.

		<i>the field</i>	<i>analysis of a case or multiple cases</i>
Type of Problem Best Suited For Design	<i>Needing to tell stories of individual experiences</i>	<i>Grounding a theory in the views of participants</i>	<i>Providing an in-depth or understanding of a case or cases</i>
Discipline Background	<i>Drawing from the humanities including anthropology, literature, history, psychology and sociology</i>	<i>Drawing from sociology</i>	<i>Drawing from psychology, law, political science, medicine</i>
Unit Of Analysis	<i>Studying one or more individuals</i>	<i>Studying a process, action, or interaction involving many individuals</i>	<i>Studying an event, a program, an activity, more than one individual</i>
Data Collection Form	<i>Using primarily interview and documents</i>	<i>Using primarily interviews with 20-60 individuals</i>	<i>Using multiple sources, such as interview, observations, documents, artifacts</i>
Data Analysis Strategies	<i>Analyzing data for stories, "restorying" stories, developing themes, often using a chronology</i>	<i>Analyzing data through open coding, axial coding, selective coding</i>	<i>Analyzing data through description of the case and themes of the case as well as cross-case themes</i>
Written Report	<i>Developing a narrative about the stories of an individual's life</i>	<i>Generating a theory illustrated in a figure</i>	<i>Developing a detailed analysis of one or more cases</i>

Sumber: Creswell, 2013:78-79

Kemudian dari ketiga karakteristik penelitian kualitatif di atas, level-level analisis yang dibutuhkan adalah sebagai berikut (Goldstein and Pavehouse, 2007:16) :

1. Level Global: *North-South Gap, World regions, European Imperialism, UN, Religious Fundamentalism, Terorism, World Environment, Technological Change, Information Revolution, Global Telecommunications, Worldwide Scientific and Bussines Communities*
2. Level Interstate: *Power, Balance of Power, Alliance Formation and Dissolutions, Wars, Treaties, Trade Agreements, IGOs, Diplomacy, Summit Meetings, Bargaining, Reciprocity*
3. Level Domestik: *Nationalism, Ethnic Conflict, Type of Government, Democracy, Dictatorship, Domestic Coalitions, Political Parties and*

Elections, Public Opinion, Gender, Economic Sectors and Industries, Military-Industrial Complex, Foreign Policy Bureaucracies

4. Level Individual: *Great Leaders, Crazy Leaders, Decision Making in Crisis, Psychology of Perception and Decision, Learning, Assassinations, Accidents of History, Citizen Participation (voting, rebelling, going to war, etc)*

Pendekatan Teori *Historical Sociology* dalam Demokratisasi Indonesia

Agar dapat dipahami secara komprehensif keterkaitan relasi antara pendekatan penelitian kualitatif dan level analisis, maka penulis akan mengeksplorasi relasi keduanya melalui nasionalisme dan konflik etnis di Indonesia. Relevansi korelasi keduanya begitu penting dengan menggunakan model IEMP Mann dalam hal ini. Eksplorasi akan menggunakan contoh hasil analisis melalui kerangka dasar pemikiran yang dikembangkan dari penelitian Jacques Bertrand mengenai Nasionalisme dan Konflik etnis di Indonesia.³

Meskipun Bertrand secara eksplisit tidak mengajukan model IEMP Mann dalam penelitiannya. Namun dalam hal ini secara implisit dapat dijelaskan bahwa kekuatan-kekuatan sosial yang terlibat dalam konflik etnis menjelang dan sesudah awal orde reformasi memiliki keterkaitan dengan mobilisasi kekuasaan, yang berangkat dari kepemilikan distribusi kekuasaan formal akan IEMP Mann ini dalam setiap perkembangan sejarah nasionalisme Indonesia semenjak proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dan dengan demikian hal tersebut mempengaruhi peran Indonesia dalam arena politik regional/kawasan maupun global.

Bertrand menggunakan pendekatan kualitatif yang berkarakteristik studi kasus terkait dengan level domestik mengenai nasionalisme dan konflik (kekerasan) etnis. *Isu strategis yang diangkat terkait dengan demokrasi Indonesia yang selalu mengalami konflik identitas sosial setiap mengalami fase demokratisasi.* Penelitian dilakukan melalui kompilasi beberapa konflik yang terjadi di Indonesia yang menyertai transisi rezim orde baru menuju orde reformasi yang terdesentralistik. Bertrand menggambarkan transisi demokrasi tersebut sebagai titik-titik simpang kritis, model kebangsaan dan hubungan-hubungan etnis, berdasarkan pengalaman sejarah nasionalisme Indonesia.

Ketika demokratisasi berawal pada 1998, karenanya, ledakan kekerasan etnis merupakan akibat dari pilihan yang mengikat mengenai model kebangsaan dan lembaga-lembaga yang menentukan hubungan-hubungan

³ Dalam penelitian tersebut secara garis besar Bertrand menyimpulkan bahwa lengsernya rezim orba pada 1998 lebih didasarkan pada perpecahan di kalangan elite. Yang membedakannya dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah perpecahan di kalangan elite distimulus oleh persoalan struktur fundamental sistem politik. Bertrand menyebutnya sebagai pengeroposan struktur fundamental rezim.

etnis. Krisis keuangan dan politik yang mengakibatkan jatuhnya Soeharto bukanlah sebab kekerasan etnis sesudahnya. Krisis tersebut memicu suatu periode reformasi kelembagaan, di mana debat-debat, demonstrasi dan bentuk-bentuk tindakan politik lainnya bertujuan tidak saja untuk mendefinisikan lembaga-lembaga demokrasi yang baru, tetapi juga untuk merundingkan klaim-klaim atas representasi etnis dan akses pada sumber-sumber daya (Bertrand, 2012:8).⁴ Bertrand menganalisis dua faktor yang menjelaskan aspek ledakan kekerasan etnis: *pertama*, ia menyajikan suatu keterangan mengenai bagaimana lembaga-lembaga membentuk dan memodifikasi identitas etnis melalui periode sejarah Indonesia yang berbeda-beda. Pilihan-pilihan mengikat atas lembaga yang menentukan hubungan di antara kelompok-kelompok etnis dan suku-bangsa dalam suatu negara membatasi kemungkinan-kemungkinan ditawarkan pada setiap periode reformasi kelembagaan. *Kedua*, pilihan-pilihan tadi juga dibatasi oleh konsep bangsa dan model-model kebangsaan baik yang implisit maupun eksplisit dalam lembaga-lembaga tersebut. Kedua aspek ledakan konflik (kekerasan) etnis dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori: *pertama*, menekankan peran kalangan elite (negara, militer dan musuh-musuh politik mereka) di Jakarta, yang biasanya dikenal sebagai tesis "provokasi". *Kedua*, memfokuskan pada elite lokal dan perebutan sumber daya dan kekuasaan. *Ketiga*, memusatkan perhatian pada kekesalan-kekesalan daerah dan kaitannya kebijakan-kebijakan negara.

Menarik pemikiran awal yang ingin ditekankan oleh Bertrand dalam hal ini bahwa krisis keuangan dan politik yang memiliki dimensi internasional telah memicu keterlibatan mobilisasi atas ketiga faktor kelompok sosial dalam struktur ekonomi politik orde baru di atas yang menyumbang peran besar dalam ledakan transisi orde baru yang pada hakekatnya merupakan suatu periode titik-titik simpang kritis kelembagaan kebangsaan Indonesia dalam bentuk model kebangsaan dan hubungan-hubungan etnis.

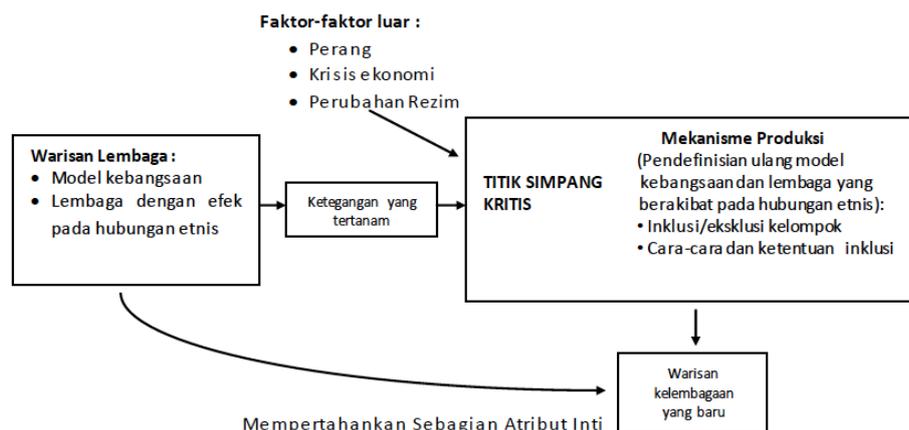
Titik-titik simpang kritis dipicu oleh faktor luar atau muncul dari ketegangan yang tercipta oleh bentuk-bentuk hubungan etnis yang terlembagakan sebelumnya. Pada titik-titik simpang ini, kekerasan cenderung terjadi ketika kecemasan muncul dan kelompok-kelompok etnis menjadi tidak yakin mengenai kompromi dan tatanan lembaga masa lalu. Kekerasan dan perundingan-perundingan selama periode tak menentu ini berkembang di sekitar prinsip pertama (inklusi/eksklusi) atau prinsip kedua (ketentuan-ketentuan inklusi) dari suatu model kebangsaan. Suatu pola baru hubungan etnis

⁴ Krisis keuangan dan politik memiliki dimensi ekonomi-politik internasional yang pada akhirnya memaksa Presiden Suharto menyetujui perjanjian keuangan dengan IMF dengan berbagai macam implikasi politik yang semakin membawa eskalasi pertarungan negara vs pasar dalam ekonomi politik Indonesia yang semakin menunjukkan arah neoliberalisme. Mengenai pertarungan negara vs pasar, Budi Winarno menggambarkannya sebagai kemenangan pasar dengan kapitalisme keuangan globalnya (Budi Winarno. 2009. *Pertarungan Negara vs Pasar*. Yogyakarta : MedPress)

dibangun pada titik simpang ini dan membuka jalan bagi periode baru hubungan-hubungan yang terlembagakan di antara kelompok-kelompok dan, biasanya, bersifat tidak begitu keras. Secara mendasar, lembaga-lembaga baru bisa mencerminkan suatu model kebangsaan yang baru, tetapi, yang lebih sering, ia merupakan ketentuan-ketentuan baru mengenai inklusi yang menjawab kekesalan-kekesalan dan ketegangan sebelumnya. Meski titik-titik simpang kritis bisa berakhir dengan hasil-hasil yang lebih stabil dan damai, ketika terurai ia meningkatkan kecenderungan konflik etnis. Batas-batas kompromi etnis menjadi kabur. Capaian-capaian dan perolehan, hak-hak istimewa, atau ketidakadilan masa lalu naik ke permukaan dengan adanya debat mengenai konfigurasi-konfigurasi lembaga baru. Ketika debat-debat berlangsung, model kebangsaan bisa menjadi terbuka juga untuk perundingan ulang-ulang, dan karenanya untuk pembongkaran kembali masalah-masalah fundamental menyangkut bangsa dan negara itu sendiri (Ibid : 39-40).

Bagan

Titik-Titik Simpang Kritis, Model Kebangsaan dan Hubungan-Hubungan Etnis



Sumber: Bertrand, 2012

Contoh penelitian yang dilakukan Bertrand dengan gambaran titik-titik simpang kritis di atas, sebenarnya menggambarkan eksistensi pengaruh faktor internal dan eksternal dalam menyumbang input terhadap warisan model kelembagaan negara-bangsa Indonesia sebelumnya. Faktor internalnya adalah setelah mengalami konversi berupa ketegangan yang tertanam akibat konflik identitas yang bermuara pada model kebangsaan dan lembaga pada efek pada hubungan etnis sebagai warisan kelembagaan sebelumnya, maka dihasilkan warisan kelembagaan yang baru dengan mekanisme produksi model kebangsaan dan bentuk kelembagaan yang menekankan aktualisasi ekspresi politik tentang inklusi/eksklusi, berikut cara-cara dan ketentuan inklusi yang berarti pendefinisian ulang model kebangsaan dan lembaga yang berakibat

pada hubungan etnis.

Melalui IEMP Mann, pendekatan sosiologi historis membantu kita memahami analisa titik-titik simpang kritis model kebangsaan dan kelembagaan suatu negara pluralis yang sedang mengalami transformasi sistem politik yang terdemokratisasikan seperti dalam kasus Indonesia dengan menginterpretasikan elemen-elemen isu strategis pendekatan sosiologi historis sebagai berikut :

1. *Power and production*: penyebaran kapitalisme industri (Oligarki pasar) yang didukung oleh ekspansi rezim militeristik orde baru dalam kapasitasnya yang menyebabkan bentuk-bentuk destruktif perang/konflik (kekerasan fisik) yang mempengaruhi perkembangan demokrasi Indonesia.⁵
2. *Power and Interdependence*: IEMP Power model menunjukkan dalam kasus nasionalisme dan konflik etnis di Indonesia bahwa konstelasi kekuatan ekonomi politik Indonesia digerakkan oleh akselerasi institusionalisasi ideologi (Pancasila) yang berbenturan dengan sub ideologi pluralisme etnis Indonesia yang terpinggirkan dari kebutuhan dan tuntutan eksklusinya. Kekuatan sistemik dari institusionalisasi ideologi negara-bangsa Indonesia ini kemudian digunakan sebagai *justification tools of power* ke dalam bentuk-bentuk eksklusifisme sistem politik ekonomi jaminan institusi militer dan ekonomi yang didalamnya terdapat para elite kelompok pendukung Presiden Suharto. Dalam konteks IEMP *power*, semua unsur memiliki ketergantungan satu sama lain dalam kontrol kuat rezim represif yang masing-masing para elite kelompok loyalis di atas hidup di dalam masing-masing kekuatan institusionalisasi ideologi, ekonomi, militer dan politik (supra struktur politik : Legislatif, eksekutif dan yudikatif).
3. *System and society*: perubahan konstelasi ekonomi politik internasional sebagai respon dari globalisasi ekonomi dunia menghadirkan apa yang disebut oleh George Soros sebagai *reforming global capitalism* di era *open society*.⁶ Hal ini dipadu dengan kekuatan kapitalisme Indonesia

⁵ Penjelasan Bertrand terkait perpecahan di kalangan elite dan ketidakstabilan sistem politik menjelang kejatuhan rezim orde baru 1998 politik, menolak anggapan sebagian besar para ilmuwan politik yang menurutnya menganalisis kejatuhan rezim tersebut akibat perebutan kekuasaan, sumber daya dan representasi di sekitar Presiden Suharto, para jenderal, serta sekelompok kecil lingkaran dalam rezim itu. Selanjutnya menurut Bertrand, para ilmuwan politik tersebut berpendapat bahwa elite politik lainnya saling berebut pengaruh dan perlindungan dari kelompok tadi, sementara hanya segelintir orang melawan secara terbuka.

⁶ Secara eksplisit Soros juga menjelaskan bahwa *open society* merupakan momentum kini dalam sejarah masyarakat global yang berdiri di atas pondasi arsitektur keuangan global dan politik global. Untuk lebih lengkap baca George Soros. 2006. *Open Society – Reforming Global Capitalism*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.

yang cenderung oligarkis dalam konsentrasi kekuatan-kekuatan sosial dari kelompok elite yang mengontrol sistem politik dan ekonomi Indonesia.

4. *Morality, culture and the emotions*: Moralitas, budaya dan emosi yang menyertai produk sejarah transisi demokrasi dalam titik-titik simpang kritis dan model kebangsaan negara-bangsa Indonesia meninggalkan sejumlah eksplanasi konflik identitas (etnis dan agama) dalam rangka mempertemukan sintesis dua bentuk mekanisme produksi titik simpang kritis (inklusi/eksklusi kelompok dan cara-cara berikut ketentuan inklusi) yang sarat akan unsur-unsur moralitas, kultur dan emosi dalam konteks pluralism masyarakat Indonesia. Eksplanasi yang dimaksud dalam hal ini terkait dengan sejumlah identifikasi identitas tertanam sebagai warisan konflik identitas dari masing-masing kelompok yang bertikai. Klinken mendeskripsikan identitas tertanam ini ke dalam berbagai macam karakteristik konflik komunal seperti⁷ : Perasaan ingin populer dan kenapa para pengikut mau turut serta, kepentingan kelas melawan kepentingan komunal, motivasi ketakutan ketimbang mencium peluang, kaum elit lokal yang suatu saat menjadi domba yang pasif dan di lain waktu adalah serigala bagi satu sama lain dan melejitnya berbagai identitas yang sebelumnya tidak dipolitisir (Klinken, 2007:232-235).

Pendekatan teori sosiologi historis dalam hal ini memberikan sumbangan konseptual dan empiris terhadap perkembangan dinamika sejarah demokratisasi Indonesia. Keduanya mewarisi setiap perjalanan titik-titik simpang kritis warisan dan model kebangsaan yang digerakkan dari konflik antar kelompok identitas tertanam akan kebutuhan dan tuntutan mekanisme produksi inklusi dan eksklusivitas dalam wadah nasionalisme Indonesia.

Dengan demikian persoalan nasionalisme dan konflik etnis ditinjau dari karakteristik penelitian kualitatif melalui pendekatan teori sosiologi historis menyimpulkan output jenis penelitian kualitatif berupa studi kasus yang dirangkum dalam tabel penjelasan karakteristik di bawah ini:

Tabel
Karakteristik Penelitian Studi Kasus

⁷ Klinken tidak secara langsung menyebutkan persoalan transisi warisan kelembagaan negara-bangsa terkait beberapa episode konflik komunal yang terjadi. Namun setiap episode merupakan gambaran kohesif akan transisi demokrasi sebagai respon atas kekacauan sistem politik menjelang perubahan demokrasi Indonesia ke arah yang lebih reformatif daripada sebelumnya.

Focus	<i>Studi kasus</i>
Type of Problem Best Suited For Design	<i>Mengembangkan sebuah deskripsi mendalam yang dihasilkan dari analisis akan kasus per kasus dari konflik komunal (etnis) pada periode demokratisasi Indonesia pra dan pasca reformasi 1998</i>
Discipline Background	<i>Menyediakan pemahaman komprehensif akan sebab-sebab konflik komunal (etnis)</i>
Unit Of Analysis	<i>Politik domestik dalam konteks nasionalisme, demokrasi dan konflik etnis</i>
Data Collection Form	<i>Analisis data diambil dari sumber-sumber multiple seperti hasil interview (in-depth), hasil-hasil observasi sebelumnya, telaah dokumen-dokumen relevan maupun artefak-artefak konflik</i>
Data Analysis Strategies	<i>Hasil collecting data kemudian dianalisis dalam bentuk pendeskripsian secara cross case dari masing-masing tema konflik</i>
Written Report	<i>Hasil Analisis detail secara keseluruhan secara cross case menunjukkan karakteristik aktor-aktor yang terlibat konflik komunal (etnis). Pembentukan aktor (kelompok/elite kelompok yang bertikai) membentuk nasionalisme Indonesia melalui titik-titik simpang kritis transisi demokrasi sebagai respon terhadap warisan kelembagaan sebelumnya (model kebangsaan dan lembaga dengan efek pada hubungan etnis)</i>

Karakteristik penelitian studi kasus dalam konteks warisan kelembagaan yang dijelaskan Bertrand di atas pada akhirnya merelevansikan hubungan kausal dari tipologi kontestasi politik lokal Indonesia melalui titik-titik simpang kritis warisan dan model kebangsaan yang menstimulus terjadinya konflik antar kelompok identitas tertanam. Kelompok-kelompok identitas yang membutuhkan dan menuntut mekanisme produksi inklusi dan eksklusivitas. Dan kebutuhan dan tuntutan mekanisme produksi inklusi dan eksklusivitas ini pada hakekatnya dipengaruhi oleh dua faktor gerakan kontestasi politik lokal Indonesia. *Pertama*, yaitu motif gerakan dan *yang kedua*, konteks gerakan. Keduanya menjelaskan perseteruan politik yang berada dalam pigura kontestasi politik lokal dalam transisi demokrasi Indonesia dari orde baru kepada orde reformasi pasca 1998 dalam bingkai nasionalisme Indonesia.

Pendeskripsian hubungan kausal tersebut diatas dapat digambarkan melalui diagram berikut di bawah ini:

Tabel:

Konstelasi Politik Lokal Yang Dipengaruhi Oleh Motif dan Konteks Gerakan Perseteruan Politik

Konstelasi Politik Lokal (A) = (B)+(C)	Motif Gerakan Perseteruan Politik (B)	Konteks Gerakan Perseteruan Politik (C)
<p>□□ <i>Bagaimana pola dinamika politik lokal</i> (tipe dinamika konflik politik)</p>	<p>Benar tidak kegeraman masyarakat di jalanan sesungguhnya melebihi apa yang bisa dijelaskan hanya sekedar sebagai alat pencapai kepentingan kaum elit lokal. (resistensi kelompok masyarakat di jalanan memiliki makna lebih dari sekedar alat pencapaian kepentingan kaum elit lokal)</p>	<p>Perasaan populer dan kenapa para pengikut mau turut serta (<i>contoh : konflik etnis kalbar</i>)</p>
<p>□□ <i>Apakah ada pola tertentu yang muncul dari berbagai daerah?</i> (pola konflik politik)</p>	<p>Warga negara biasa tampak kurang tergerak oleh keluhan tentang beratnya tekanan ekonomi daripada rasa terkoyaknya identitas (<i>why</i>)</p>	<p>Kepentingan kelas vs kepentingan komunal (<i>contoh : konflik Poso</i>)</p>
<p>□□ <i>Bagaimana efek dinamika politik daerah terhadap konsolidasi demokrasi di tingkat daerah</i> (efek dinamika konflik politik)</p>	<p>Bukankah orang berbuat sesuatu lebih karena ketakutan dibanding karena mencium sebuah peluang politis?</p>	<p>Motivasi Ketakutan dari-pada mencium peluang politik (<i>contoh : kasus Ambon</i>)</p>
<p>□□ <i>Aktor seperti apa yang cenderung menguasai politik lokal? Institusi macam apa yang menjadi kendaraan politik elit lokal</i> (hegemoni aktor dan institusi politik)</p>	<p>Bagaimana mungkin para elit lokal yang dulu begitu pasif dan dengan patuh mengikuti perintah penguasa Orba, kemudian mendadak menjadi musuh bebuyutan setelah tahun 1987 ?</p>	<p>Kaum elit lokal yang suatu saat menjadi pengi-kut pasif dan di lain wak-tu adalah serigala bagi satu sama lain . (<i>contoh : Maluku Utara, Kalteng</i>).</p>
<p>□□ <i>Apakah ada polarisasi, friksi atau konflik yang merupakan fungsi dari struktur tradisi dan kultur lokal</i> □ <i>Apakah jaringan politik berbasis cultural bisa membentuk aliansi politik dominan di tingkat lokal</i> (polarisasi dan jaringan konflik politik)</p>	<p>Bukankah identitas-identitas etnik sangat sulit dipolitisir pada tahun sebelum semua terjadi, dan jika benar, bagaimana mungkin mereka begitu mudah digerakkan pasca 1998?</p>	<p>Melejitnya secara tiba-tiba berbagai identitas yang sebelumnya tidak dipolitisir, pembentukan aktor-aktor baru. (<i>contoh : Kalteng dan Kalbar</i>)</p>

Sumber: diolah dari Baswedan, 2007 dan Klinken, 2010.

Kesimpulan

Meskipun tidak tertutup kemungkinan pendekatan teori *historical sociology* bisa diaplikasikan pada level analisis global dan interstate, namun jika mengacu kepada karakteristik-karakteristik penelitian kualitatif seperti yang telah dijelaskan oleh Creswell di atas, maka pendekatan teori *historical sociology* akan lebih bermakna secara ontologis, epistemologis maupun

aksiologis pada tataran *intrastate*. Dalam artian mencakup level domestik dan individual.

Kita kembali mengingatkan pada relevansi ketiga ide dan asumsi dasar yang menjadi pemikiran utama pendekatan teori sosiologi *historical sociology* dalam penjelasan awal di atas. Sintesis kesimpulan yang bisa didapat terkait level analisis domestik dan individu adalah: dikarenakan struktur sosial adalah hasil dari serangkaian proses sosial yang kompleks di dalam suatu negara-bangsa, maka hasilnya adalah di dalam struktur sosial itu terdapat kekuatan-kekuatan sosial dominan yang menjadi kekuatan struktur politik di dalam suatu sistem politik negara-bangsa yang bersangkutan. Kekuatan-kekuatan sosial dominan ini memiliki basis-basis *power* di dalamnya yang bersumber dari ideologi, ekonomi, militer dan politik, sehingga mempengaruhi jalannya distribusi kekuasaan secara kolektif, ekstensif dan otoritatif.

Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian hubungan internasional yang menggunakan pendekatan teori *historical sociology* harus berangkat terlebih dahulu apa yang sebenarnya terjadi dalam interaksi-interaksi politik antar berbagai kekuatan sosial politik dalam mempengaruhi struktur politik yang ada dari sistem politik yang dianut oleh negara-bangsa yang bersangkutan. Dengan demikian penekanannya terfokus pada apa yang terjadi dalam dinamika politik lokal di negara-bangsa tersebut. Dinamika politik lokal ini menghasilkan fenomena isu strategis yang dimunculkan dari hasil pergolakan politik yang terjadi pada negara-bangsa tersebut. Tidak terkecuali dalam kasus perseteruan (*contentious*) politik di Indonesia, yang menghasilkan tipologi konstelasi politik lokal yang dipengaruhi oleh faktor motif dan konteks gerakan politik sebagai kelanjutan akan warisan kelembagaan dan model kebangsaan dalam bingkai nasionalisme Indonesia.

Terkait juga dengan penulisan paper ini, maka penulis sekaligus menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada LP2M UAI dalam memberikan dukungan sepenuhnya sehingga tulisan ini bisa diselesaikan sesuai dengan batas akhir waktu yang ditetapkan.

Referensi

- Bertrand, Jacques. 2012. *Nasionalisme dan Konflik Etnis Di Indonesia*. Terjemahan : Achmad Munjid. Jakarta : Ombak.
- Baylish, John and Smith, Steve (eds). 2005. *The Globalization Of World Politic – An Introduction to International Relations*. New York : Oxford University Press.

- Burchill, Scott., Linklater, Andrew., Devetak, Richard., *et.al.* 2009. *Theories Of International Relations*. New York : Palgrave Macmillan.
- Baswedan, Anies. 2007. *Politik Lokal Di Indonesia*. Dalam Henk Schulte Nordholt & Gerry Van Klinken. Jakarta: KITLV&Yayasan Obor Indonesia
- Creswell, John W. 2013. *Qualitative Inquiry & Research Design – Choosing Among Five Approach*. California : Sage.
- Griffiths, Martin. 1999. *Fifty Key Thinkers In International Relations*. New York : Routledge
- Goldstein, Joshua S. & Pevehouse, Jon C. 2007. *International Relations : 2006-2007 Edition*. New York : Pearson Longman.
- Klinken, Gerry Van. 2007. *Perang Kota Kecil – Kekerasan Komunal dan Demokratisasi Di Indonesia*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia Dan KITLV.
- Mas'ood, Mohtar. 1994. *Ilmu Hubungan Internasional – Teori dan Metodologi*. Jakarta : LP3ES. 15
- Mansbach, Richard W. & Rafferty, Kirsten L., 2012. *Pengantar Politik Global*. Terjemahan : Amat Asnawi. Bandung : Nusa Media.
- Soros, George. 2006. *Open Society : Reforming Global Capitalism*. Terjemahan: Sri Koesdiyantinah. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.